

Judul : Hidayat Nur Wahid soal Somaliland, Israel alihkan isu kejahatan di Gaza
Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Hidayat Nur Wahid Soal Somaliland

Israel Alihkan Isu Kejahatan Di Gaza

DPR mengecam keras manuver Israel yang mengakui Somaliland sebagai sebuah negara. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan bagian sah dari Republik Somalia yang saat ini dikuasai kelompok separatis. Langkah Israel dinilai berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara dan stabilitas kawasan.

Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menilai, pengakuan tersebut sebagai upaya pengalihan perhatian dunia dari kejahatan kemanusiaan yang terus dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia diminta segera menegaskan sikap penolakan, sejalan dengan sikap komunitas internasional yang menghormati keutuhan wilayah Somalia.

Politikus yang akrab disapa HNW itu mengingatkan bahwa manuver Israel perlu diwaspadai karena mencerminkan praktik politik divide et impera. Strategi lama ini bertujuan memecah negara berdaulat demi memuluskan kepentingan Israel dalam memperluas penjajahan di wilayah Palestina.

"Melalui manuver ini, Israel berupaya mengalihkan perhatian dunia dari nestapa Gaza akibat

pelanggaran perjanjian damai yang terus dilakukan," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Diketahui, Somaliland memisahkan diri dari Somalia sejak 1991 setelah tumbang rezim diktator Siad Barre. Wilayah semi-gurun di pesisir Teluk Aden itu mendeklarasikan kemerdekaan, namun hingga kini tidak diakui oleh komunitas internasional. Israel menjadi satu-satunya negara yang menyatakan pengakuan tersebut pada Sabtu (27/12/2025).

HNW menilai, ketika dunia sibuk menolak pengakuan Israel atas Somaliland, pasukan Israel justru kembali melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan militer besar-besaran ke Tepi Barat. Situasi ini dinilai semakin berbahaya karena munculnya wacana menjadikan Somaliland sebagai tujuan relokasi warga Gaza.

Menurutnya, rencana tersebut merupakan bagian dari skenario pengusiran massal warga Gaza agar wilayah Palestina sepenuhnya berada di bawah kendali Israel. "Manuver berbahaya ini harus ditolak oleh seluruh pihak



Hidayat Nur Wahid

yang menginginkan perdamaian di Timur Tengah," tegasnya.

Penolakan itu, lanjut HNW, semestinya digaungkan oleh 156 negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, termasuk seluruh anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam berbagai KTT, negara-negara tersebut telah sepakat menolak segala bentuk pengusiran warga Gaza dengan dalih apa pun.

Ia juga menegaskan, Indonesia perlu menyatakan penolakan secara terbuka. Penolakan luas telah disampaikan oleh China,

Uni Eropa, Uni Afrika beserta negara anggotanya, Liga Arab, OKI, Parlemen Liga Arab, hingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Semua pihak menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Somalia. Ini momentum agar Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan menolak pengakuan Israel atas Somaliland tanpa veto Amerika Serikat," tegas Wakil Ketua MPR itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukanta menambahkan, pengakuan Israel terhadap Somaliland bukan sekadar isu lokal. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memecah Somalia sebagai negara berdaulat, memicu konflik horizontal, serta mengancam stabilitas kawasan Laut Merah dan Afrika Timur.

Ia menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam menjaga persatuan Somalia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Tanduk Afrika. Situasi ini juga beririsan dengan ketegangan global dan berlanjutan tragedi kemanusiaan di Gaza.

"Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif dan

penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan diplomatik untuk menjaga perdamaian dunia," ujar Sukanta. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah diplomatik konkret.

Langkah tersebut antara lain mendorong dialog politik inklusif antara Pemerintah Somalia dan otoritas Somaliland untuk mencegah disintegrasi dan konflik bersenjata. Indonesia juga dapat mengoptimalkan diplomasi dengan negara-negara kunci seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, serta anggota OKI.

Selain itu, keterlibatan aktif Uni Afrika dan mekanisme multilateral internasional dinilai penting agar persoalan Somalia diselesaikan secara damai dan bermartabat, serta menolak segala bentuk intervensi asing yang memperkeruh konflik.

"Indonesia harus konsisten menjunjung prinsip kedaulatan negara dan penyelesaian konflik secara damai. Upaya memecah Somalia hanya akan menciptakan instabilitas baru dan berdampak pada keamanan global," pungkas Sukanta. ■ TIF